

Urgensi Pentingnya *Green Accounting* Di Indonesia

Athia Zainun Maimanah¹, Ayu Sulistyorini², Dila Yulia Dwi Sparingga³, Gusti Nadya Ramadhanti Hariadhi⁴, Maritza Azhara⁵, Naila Alfi Rizqiyah⁶, Ridho Septian Waluyo⁷, Sabrina Alifia Salsabila⁸
^{1,2,3,4,5,6,7,8}Politeknik Negeri Jember

[*d42210552@student.polije.ac.id](mailto:d42210552@student.polije.ac.id)

Abstrak

Green accounting sangat penting bagi pemerintah karena memungkinkan integrasi aspek lingkungan ke dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Dengan green accounting, pemerintah dapat lebih akurat mengukur dan mengelola dampak lingkungan dari berbagai program dan proyek. Hal ini mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kebijakan yang lebih berkelanjutan. Ketidakkonsistenan pemerintah dengan mengabaikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tata ruang menyebabkan kegiatan komersial, industri, dan pertambangan mengambil alih wilayah yang sebelumnya dilindungi sehingga menyebabkan kewenangan lingkungan hidup sekarang jauh lebih terbatas di tingkat kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang mengandalkan informasi yang berasal dari kondisi, situasi, sikap, hubungan, atau kerangka teoritis dari suatu masalah. Langkah selanjutnya, setelah pengumpulan data dari studi lapangan, adalah pengolahan data, yang meliputi analisis data, deskripsi data, dan penarikan kesimpulan. Polusi tanah, air, dan udara, serta bentuk-bentuk lain dari limbah lahan, dapat menjadi subjek penelitian di masa depan. Studi ini menemukan variasi perhatian dan tanggung jawab perusahaan besar dan menengah terhadap isu lingkungan, termasuk dalam pelaporan dan audit lingkungan, serta menginspirasi perlunya investigasi lebih mendalam. Untuk meningkatkan kegunaan akuntansi lingkungan, perusahaan harus mengatasi hambatan pelaporan dan mengungkapkan dampak operasionalnya secara lebih transparan.

Kata Kunci: Green Accounting, Pemerintah, Lingkungan, Sosial

Abstract

Green accounting is crucial for the government as it enables the integration of environmental aspects into public policy decision-making. With green accounting, the government can more accurately measure and manage the environmental impacts of various programs and projects. This supports transparency, accountability, and more sustainable policies. Inconsistencies in government policies that disregard spatial regulations have led to commercial, industrial, and mining activities encroaching on previously protected areas, resulting in significantly diminished environmental authority at the district/city level. This research employs descriptive analysis based on information derived from conditions, situations, attitudes, relationships, or theoretical frameworks of an issue. The next step, after collecting data from field studies, is data processing, which includes data analysis, data description, and concluding. Soil, water, and air pollution, along with other forms of land waste, could be subjects of future research. This study found variations in the attention and responsibility of large and medium-sized companies towards environmental issues, including environmental reporting and audits, and it inspires the need for more in-depth investigations. To enhance the usefulness of environmental accounting, companies must overcome reporting barriers and disclose their operational impacts more transparently.

Keywords: Green Accounting, Government, Environmental, Social

PENDAHULUAN

Menanggapi dampak bencana alam yang menghancurkan pada kehidupan manusia, komunitas internasional telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengurangi bencana semacam itu di masa depan. Ilustrasi sederhana dari aktivitas manusia sebagai upaya dunia untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah perjuangan melawan perubahan

iklim. Ini hanyalah salah satu contoh dari hal yang memicu pergeseran perspektif diantara pemerintah, bisnis, dan pemerhati lingkungan, yang semuanya melihat bahwa lingkungan adalah sumber daya penting untuk pekerjaan mereka dan mulai peduli tentang hal itu lebih dari sekadar menghasilkan keuntungan. Konsep “*Green Accounting*” akan berdampak pada industri akuntansi di Indonesia sebagai hasil dari inisiatif kesadaran lingkungan. Eropa melihat awal dari apa yang sekarang dikenal sebagai akuntansi lingkungan atau akuntansi hijau pada tahun 1970-an, dan tahun 1980-an melihat pertumbuhan penelitian yang berhubungan dengan akuntansi hijau. Masalah lingkungan mendapat perhatian yang lebih teoritis dan praktis di negara-negara industri seperti Jepang dan Eropa. Banyaknya peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan pengaturan ini adalah buktinya. Pendekatan akuntansi lingkungan yang dikenal sebagai “akuntansi hijau” mencoba untuk memperhitungkan manfaat dan biaya moneter terhadap lingkungan ketika membuat keputusan keuangan atau menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Istilah “akuntansi hijau” mengacu pada praktik-praktik yang bertujuan untuk memperhitungkan dampak dan biaya lingkungan ketika membuat keputusan keuangan.

Data dan sistem audit yang terkait dengan lingkungan merupakan inti dari akuntansi hijau. Jika diterapkan dengan benar, akuntansi hijau dapat memberikan dampak positif terhadap isu-isu sosial dan lingkungan, serta terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di negara manapun, dan terhadap cara perusahaan menangani tanggung jawab sosial dan lingkungan (Azizah, 2022). Selain itu, perusahaan menggunakan akuntansi hijau sebagai alat untuk membantu mereka memenuhi tujuan mereka terkait dengan tanggung jawab pemangku kepentingan, namun masih terdapat kelangkaan transparansi akuntansi lingkungan di negara-negara berkembang. Penelitian di bidang pengungkapan akuntansi sosial telah menunjukkan bahwa ada kurangnya transparansi dalam hal bagaimana perusahaan melaporkan dampaknya terhadap lingkungan. Lemahnya sanksi hukum di negara tersebut berkontribusi terhadap kendala ini. Banyak orang berbicara tentang akuntansi lingkungan ketika mereka berbicara tentang akuntansi sosial. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tujuan utama dari kedua wacana tersebut adalah untuk memasukkan ke dalam aspek-aspek laporan keuangan perusahaan terkait baik dan buruk dari lingkungan sosial dan ekologi.

Green accounting sangat penting bagi pemerintah karena memungkinkan integrasi aspek lingkungan ke dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Dengan *green accounting*, pemerintah dapat lebih akurat mengukur dan mengelola dampak lingkungan dari berbagai program dan proyek. Hal ini mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kebijakan yang lebih berkelanjutan. Akuntansi lingkungan, seperti halnya akuntansi sosial, mengalami kesulitan dalam memberikan harga pada manfaat dan biaya eksternalitas yang disebabkan oleh operasi industri, dan akuntansi lingkungan sebagai praktik di Indonesia sejauh ini belum memberikan hasil yang positif. Kadang-kadang, pertimbangan lingkungan hidup dikesampingkan dalam pembangunan dan otonomi daerah yang serba cepat, yang diakui atau tidak, pasti akan menimbulkan masalah-masalah lingkungan hidup yang besar. Para pemerhati lingkungan di Indonesia mengaitkan kondisi saat ini dengan penegakan hukum lingkungan yang tidak konsisten dari pemerintah. Salah satu contoh ketidakkonsistenan pemerintah adalah cara pemerintah mengabaikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tata ruang. Kegiatan komersial, industri, dan pertambangan mengambil alih wilayah yang sebelumnya dilindungi. Sebagai hasil dari otonomi daerah, kewenangan lingkungan hidup sekarang jauh lebih terbatas di tingkat kabupaten/kota. Risiko kerusakan lingkungan akan meningkat dengan tidak adanya peraturan yang ketat baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, sehingga ketika sebuah perusahaan memperhatikan masalah lingkungan di daerahnya, maka perusahaan tersebut

dianggap peduli terhadap masalah lingkungan. Kedua, ketika sebuah bisnis aktif dalam konservasi atau perawatan lingkungan, bisnis tersebut dianggap memiliki perhatian yang baik. Bisnis kemudian harus melaporkan akuntansi lingkungan. Audit lingkungan, yang mengukur efektivitas dan efisiensi program kepedulian lingkungan, adalah tingkat terakhir dari jenis kepedulian ini.

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian *Green Accounting*

Tujuan dari “akuntansi hijau” adalah untuk memasukkan dampak perusahaan terhadap lingkungan dalam pelaporan keuangannya. Fakta bahwa PDB tidak memperhitungkan faktor lingkungan ketika membuat keputusan sudah diketahui umum. Tujuan dari akuntansi lingkungan adalah untuk mendukung upaya komunikasi terhadap pembangunan berkelanjutan, menjaga hubungan positif dengan masyarakat, dan memastikan bahwa upaya pelestarian lingkungan berjalan efektif dan efisien, serta menentukan biaya dan manfaatnya.

B. Pengertian *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Perusahaan memiliki kewajiban terhadap masyarakat dan ekosistem tempat mereka beroperasi, dan salah satu cara untuk menunjukkan bahwa mereka melakukan hal tersebut adalah melalui apa yang dikenal sebagai “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” (CSR). Sebagai sebuah fenomena strategi bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berusaha untuk memenuhi tuntutan dan mengejar kepentingan semua pihak yang terlibat. Tanggung jawab sosial perusahaan telah ada sejak perusahaan menyadari bahwa kelangsungan hidup jangka panjang mereka lebih penting daripada keuntungan jangka pendek.

C. Fungsi *Green Accounting*

1. Proses Internal

Sebagai bagian integral dari sistem informasi lingkungan perusahaan, fungsi internal dapat membantu melacak pengeluaran upaya konservasi, membandingkan pengeluaran tersebut dengan manfaatnya, dan menemukan cara untuk membuat upaya konservasi lebih efisien dan efektif. Sebagai alat manajemen, akuntansi lingkungan dapat digunakan oleh para manajer dan divisi bisnis yang terkait.

2. Tujuan Eksternal

Sebuah organisasi dapat mempengaruhi pilihan para pemangku kepentingannya-termasuk pelanggan, mitra bisnis, investor, dan masyarakat-melalui fungsi eksternal dengan membagikan hasil pengukuran kuantitatif dari upaya konservasi lingkungan. Menerbitkan akuntansi lingkungan harus memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas pemangku kepentingan dan digunakan untuk menilai upaya konservasi lingkungan. Pada akhirnya, akuntansi lingkungan berusaha untuk meningkatkan kuantitas informasi yang berguna yang dapat diakses oleh mereka yang membutuhkannya. Bagaimana perusahaan mengkategorikan biaya-biaya yang dikeluarkannya tidak relevan dengan kemampuan akuntansi lingkungan.

D. Jenis Akuntansi Lingkungan

Ada tiga jenis akuntansi lingkungan yang berbeda dari perspektif pengguna akhir.

1. Pendapatan dari Akuntansi Nasional

Dalam konteks akuntansi pendapatan nasional, akuntansi lingkungan disebut sebagai akuntansi sumber daya alam. Jenis akuntansi ini menyajikan informasi statistik tentang konsumsi sumber daya terbarukan dan tak terbarukan di suatu negara, serta kualitas dan nilainya.

2. Akuntansi untuk Uang

Proses penyusunan laporan pertanggungjawaban lingkungan untuk pengguna eksternal yang sesuai dengan GAAP dikenal sebagai akuntansi lingkungan dalam kerangka akuntansi keuangan.

3. Mengelola akun

Istilah “akuntansi lingkungan” digunakan dalam konteks akuntansi manajemen untuk menggambarkan bagaimana operasi perusahaan mempertimbangkan pelestarian lingkungan dalam penentuan biaya, keputusan investasi modal, dan evaluasi kinerja.

E. Konsep *Green Accounting*

Bisnis besar dan kecil, baik di industri jasa maupun industri, dapat mengambil manfaat dari penggunaan sistem akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan perlu diterapkan secara metodis atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dukungan manajemen dan partisipasi fungsional sangat penting agar akuntansi lingkungan menjadi efektif. Perlu ditemukan metode untuk memasukkan biaya lingkungan, seperti gagasan eksternalitas, yang meneliti efek langsung dari tindakan entitas terhadap aspek sosial, non-sosial, dan ekologi lingkungan. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab lingkungan. Untuk mulai menangani biaya lingkungan, perlu untuk mengklasifikasikan berbagai jenis biaya yang terkait sesuai dengan kriteria seperti lokasi lokasi limbah, jenis limbah berbahaya, teknik pembuangan, dan lain-lain (Lako, 2018). Biaya langsung dan tidak langsung diperhitungkan sebagai biaya lingkungan. Berbagai biaya tersembunyi, termasuk yang terkait dengan kemungkinan tindakan hukum, dapat muncul. Menggunakan sistem penilaian biaya lingkungan dapat meningkatkan penetapan harga produk, evaluasi pengelolaan limbah, penilaian pencegahan polusi, pemilihan input manufaktur, dan keputusan bauran produk. Metode akuntansi tradisional, penetapan biaya berbasis aktivitas, akuntansi biaya penuh, dan penilaian biaya total adalah beberapa cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menghitung biaya lingkungan.

F. Peraturan Yang Terkait Dengan *Green Accounting*

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tanggung jawab untuk pemeliharaan, pengelolaan, dan penyediaan informasi yang akurat mengenai lingkungan hidup dibebankan kepada semua orang yang terlibat dalam bisnis atau kegiatan berdasarkan undang-undang ini. Pelanggaran yang menyebabkan degradasi dan pencemaran lingkungan juga telah diidentifikasi memiliki dampak hukum.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas. Perusahaan yang berurusan dengan sumber daya alam diwajibkan oleh undang-undang ini untuk memperhitungkan biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan ketika membuat anggaran mereka. Konsekuensi atas pelanggaran aturan ini akan ditentukan oleh peraturan dan regulasi yang berlaku.

G. Sifat Dasar Akuntansi Lingkungan

Menurut Fasua dalam Nurafika & Nurmala Sari (2019) menyebutkan bahwa sifat dasar akuntansi lingkungan terdiri dari berikut

1. Relevan

Untuk membantu para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang tepat, akuntansi lingkungan harus menyediakan data yang dapat diandalkan mengenai biaya dan manfaat dari upaya konservasi. Namun demikian, penting untuk mempertimbangkan relevansi dan materialitas dari masalah tersebut. Pertimbangan kuantitatif diberikan bobot

yang lebih besar dalam akuntansi lingkungan dibandingkan dengan pertimbangan kualitatif. Data yang dinyatakan dalam nilai moneter atau unit fisik diberi perhatian dari sudut pandang materialitas, yang berfokus pada signifikansi kuantitatifnya. Sebaliknya, relevansi melihat kualitas data melalui lensa pelestarian lingkungan dan dampaknya di masa depan.

2. Dapat diandalkan

Akuntansi lingkungan yang akurat dan dapat diandalkan dapat membantu menghindari data yang bias atau tidak benar dan membangun kredibilitas dengan para pemangku kepentingan. Akurat dan mampu menunjukkan biaya-manfaat, pengungkapan data akuntansi lingkungan tidak boleh menipu. Kepatuhan terhadap hukum yang relevan tidak boleh menjadi satu-satunya motivasi untuk mengungkapkan informasi akuntansi lingkungan. Jika diperlukan, perusahaan harus memilih metode pengungkapan terbaik dan memberikan rincian yang tepat tentang tindakan lingkungan yang dilakukannya. Informasi tambahan harus disediakan untuk menjelaskan secara lebih menyeluruh jika pengungkapan tersebut tidak sepenuhnya dinyatakan ketika mengikuti format yang disyaratkan oleh peraturan yang relevan. Sangat penting bahwa semua upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh akuntansi lingkungan harus mencakup semua aspek yang relevan dan penting.

3. Membuatnya mudah untuk dipahami

Akuntansi lingkungan harus membuat penilaian yang salah atas upaya perusahaan dalam menyelamatkan lingkungan tidak mungkin terjadi dengan menyediakan data keuangan yang transparan dan mudah dipahami. Bahasa yang digunakan harus dibuat sesederhana mungkin untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan dapat dengan mudah memahami informasi yang dirilis. Sangat penting untuk mengungkapkan semua hal yang dianggap penting, terlepas dari seberapa rumit isi informasi tersebut.

4. Dapat diverifikasi

Objektivitas adalah kunci ketika memeriksa data akuntansi lingkungan. Data dianggap dapat diverifikasi jika dapat direplikasi dengan hasil yang sama dengan menggunakan sumber, kriteria, dan prosedur yang sama dengan pembuat data asli.

H. Ruang Lingkup Akuntansi Lingkungan

Tujuan dari akuntansi lingkungan adalah untuk mencatat keberhasilan perusahaan sekaligus menghitung biaya dan manfaat sosial dari operasi mereka. Sebagai sebuah teknik, akuntansi lingkungan dapat digunakan dalam berbagai skala. Semua keinginan, kebutuhan, tujuan, dan sumber daya perusahaan harus dipertimbangkan ketika memilih skala. Tantangan dalam mendefinisikan ruang lingkup akuntansi lingkungan adalah bahwa tidak selalu memungkinkan bagi perusahaan untuk mengukur biaya lingkungan yang terkait dengan operasi mereka. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi organisasi untuk mengukur cakupan yang terlalu luas.

I. Biaya Perlindungan Lingkungan

Saat ini belum ada peraturan yang mewajibkan pengungkapan akuntansi lingkungan atau pelaporan keuangan di sebagian besar negara, termasuk Indonesia. PSAK belum sepenuhnya mengakomodasi tanggung jawab entitas dalam upaya pelestarian lingkungan. Sangat penting bagi kita untuk membahas dua hal ini:

Pertama, pengungkapan yang jujur masih bersifat opsional. Sebelum memutuskan apakah akan mengungkapkan informasi lingkungan atau tidak, perusahaan akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Perusahaan akan memberikan informasi dengan sukarela jika keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Jumlah dan cakupan pengungkapan informasi

lingkungan juga dipengaruhi oleh hal ini. Mengungkapkan “berita buruk” dapat menjadi pilihan bagi perusahaan.

Kedua, Biaya lingkungan tidak dimasukkan sebagai biaya operasi tidak langsung tambahan atau harga pokok produksi karena akuntansi lingkungan tidak dipandang sebagai komponen penting dari operasi perusahaan. Lebih tepatnya, biaya lingkungan pada dasarnya adalah biaya apa pun yang muncul karena tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan barang dagangannya. Biaya lingkungan ini tidak akan menjadi masalah jika perusahaan tidak melakukan aktivitas produksi. Akuntansi lingkungan memerlukan perhitungan beberapa komponen keuangan sebagaimana biaya berikut.

1. Biaya operasional usaha

Biaya yang terdiri dari biaya penyusutan fasilitas lingkungan, biaya perbaikan fasilitas lingkungan, biaya jasa atau kontrak untuk melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan, biaya tenaga kerja untuk mengoperasikan fasilitas pengelolaan lingkungan, serta biaya kontrak untuk pengelolaan limbah (daur ulang)

2. Biaya daur ulang limbah

Biaya yang terdiri dari bahan, barang, dan fasilitas pabrik yang ramah lingkungan merupakan hasil dari penelitian dan pengembangan ekstensif, yang mencakup seluruh biaya sumber daya, tenaga ahli, dan pekerjaan lainnya.

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui apa yang diketahui dan tidak diketahui oleh masyarakat di Indonesia mengenai *Green Accounting*, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mengolah dan menganalisis data. Penelitian deskriptif mengandalkan informasi yang berasal dari kondisi, situasi, sikap, hubungan, atau kerangka teoritis dari suatu masalah. Langkah selanjutnya, setelah pengumpulan data dari studi lapangan, adalah pengolahan data, yang meliputi analisis data, deskripsi data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian kualitatif sering kali menggunakan teknik analisis data selama dan setelah fase pengumpulan data. Analisis peneliti terhadap tanggapan narasumber sudah dimulai pada saat pengumpulan data. Kegiatan penelitian ini untuk mengevaluasi data kualitatif menggunakan paradigma analisis data yang diusulkan oleh Sugiyono (2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan *Green Accounting* di Indonesia

Pembangunan berkelanjutan adalah topik dari KTT Bumi 1992, juga dikenal sebagai Konferensi Lingkungan dan Pembangunan, yang diselenggarakan di Rio de Janeiro oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut pembukaan Agenda-21, lebih dari 178 negara yang berpartisipasi mencapai konsensus tentang sebuah rencana. Kemakmuran di masa depan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran lingkungan, menurut konferensi tersebut. Menurut Kelompok Kerja INTOSAI untuk Audit Lingkungan (2010), akuntansi lingkungan adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh negara-negara sebagai bagian dari Agenda 21. Sebuah artikel dari majalah Akuntan Indonesia edisi November 2007 menyatakan bahwa dampak akuntan terhadap lingkungan semakin mengkhawatirkan.

Menurut Ali Darwin, Ak, MSc, Direktur Eksekutif National Center for Sustainability Reporting (NCSR) dan Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Bidang Akuntan Manajemen (IAI-KAM), ada empat alasan utama mengapa masalah lingkungan mendapat perhatian yang lebih besar akhir-akhir ini. Keputusan-keputusan mengenai operasi, barang, dan jasa perusahaan harus

mengikuti standar akuntabilitas yang lebih tinggi, seperti yang dinyatakan oleh Ali, seiring dengan semakin besarnya perusahaan. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan aktivis juga terus meningkat. Di seluruh dunia, LSM lingkungan telah berkembang dengan pesat, tidak terkecuali di Indonesia. Gerakan lingkungan hidup dikenal dengan aksi-aksinya yang berkualitas tinggi dan terus berkembang.

Dalam hal isu-isu lingkungan, mereka akan mengekspos sisi gelap perusahaan dan memperjuangkan akuntabilitas untuk setiap kerugian yang ditimbulkan oleh operasi mereka terhadap masyarakat atau lingkungan. Selanjutnya, aspek ketiga adalah posisi perusahaan dan persepsi publik. Perusahaan modern memahami pentingnya menjaga reputasi, merek, dan citra perusahaan. Evolusi teknologi komunikasi yang cepat adalah faktor keempat. Masalah sosial dan lingkungan yang mengganggu akan berkembang baik dan menjadi lebih mudah diakses sebagai akibat dari kemajuan teknologi. Ali memberikan perhatian pada fakta bahwa semua bisnis harus memprioritaskan pembangunan berkelanjutan karena sangat penting bagi mereka untuk memenuhi tugas sosial dan lingkungan mereka.

B. Hubungan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Green Accounting*

Keseimbangan alam tidak diragukan lagi dipengaruhi oleh tingkat teknologi manusia saat ini. Seiring berjalannya waktu, lingkungan menjadi semakin terancam karena kemajuan teknologi yang pesat. Salah satu kekuatan pendorong munculnya akuntansi hijau adalah upaya dunia untuk memerangi perubahan iklim dan krisis lingkungan lainnya, sebuah hibrida dari kebijakan keuangan dan non-keuangan, “akuntansi hijau” mengevaluasi pro dan kontra dari kebijakan perusahaan tertentu untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat. Setiap keputusan kebijakan yang diambil perusahaan terkait penggunaan sumber daya lokal akan dipengaruhi oleh analisis yang diamanatkan oleh CSR mengenai implikasi lingkungan dan perkiraan biaya, secara sederhana, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memungkinkan perusahaan untuk menunjukkan tugas lingkungan mereka dengan uang yang mereka hasilkan, hal ini sejalan dengan penelitian Suyudi et al. (2020). Perusahaan akan secara konsisten terlibat dalam apa yang dikenal sebagai Green Accounting melalui inisiatif CSR mereka, hilangnya sumber daya alam merupakan fokus utama dari studi kasus green accounting yang menggunakan penilaian pasar.

Sewa sumber daya alam yang diperoleh dari penjualan output di pasar sumber daya digunakan untuk menilai nilai sekarang bersih dan variasi nilai (terutama karena penipisan) aset ketika harga pasar untuk aset alam yang tidak diproduksi tidak tersedia. Salah satu poin terkuat dari akuntansi hijau adalah bahwa akuntansi hijau dapat mengukur biaya lingkungan yang dikeluarkan baik oleh rumah tangga individu maupun perusahaan besar. Pihak-pihak yang bertanggung jawab bertanggung jawab atas dampak lingkungan mereka dibawah prinsip pencemar/pengguna membayar yang terkena. Jika dibandingkan dengan undang-undang lingkungan yang bersifat top-down, para ekonom menemukan bahwa instrumen pasar yang menginternalisasi biaya lingkungan lebih efektif dalam mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Dalam hal memasang instrumen pasar, tampaknya ketergesa-gesaan politik, daripada perkiraan biaya yang realistis, merupakan faktor penentu dalam banyak kasus ketika informasi akuntansi hijau tidak tersedia, sehingga akuntansi hijau dapat menjadi komponen CSR yang secara aktif terlibat dalam isu-isu lingkungan. Apakah suatu kebijakan bersifat moneter atau non-moneter, jika perusahaan telah mengadopsi CSR, maka perusahaan tersebut telah secara efektif mengadopsi akuntansi hijau.

C. Penerapan *Green Accounting* di Indonesia

Dalam hal operasi industri, akuntansi lingkungan mengalami kesulitan dalam menghitung manfaat dan biaya eksternalitas. Polusi udara, limbah cair, kebocoran tabung ammonia, kebocoran tabung nuklir, dan eksternalitas lainnya sulit diukur karena kerusakan yang ditimbulkannya terhadap masyarakat dan ekosistem di sekitarnya. Laporan keuangan tradisional terutama berfokus pada kinerja ekonomi dan tidak menyertakan informasi tentang kinerja sosial atau lingkungan, sejalan dengan penelitian Wangi & Lestari (2020). Demikian pula, dari sudut pandang akuntansi konvensional, tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau berurusan dengan dampak dari implementasi karena kurangnya informasi yang menyeluruh bagi para pemangku kepentingan di Indonesia. Karena reaksi pasar telah menunjukkan hasil yang tidak berbeda terhadap aktivitas perusahaan yang melaksanakan (atau tidak) kepentingan sosial dan lingkungan. Pengungkapan biaya eksternalitas akan mempengaruhi pengambilan keputusan dan pertimbangan stakeholder, hal ini sejalan dengan penelitian dari Rahmawati & Subardjo (2017). Oleh karena itu, undang-undang diperlukan untuk penerapan akuntabilitas lingkungan yang efektif Penerapan CSR di Indonesia sebagian besar dikaitkan dengan penerapan CSR untuk kategori discretionary duties. Hubungan ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, CSR bukanlah sesuatu yang diwajibkan untuk dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, melainkan merupakan inisiatif dari karyawan perusahaan. Terakhir, CSR dilakukan untuk memenuhi semua persyaratan hukum. Sebagai gambaran, menurut Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas, BUMN wajib mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk kegiatan sosial, dan perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengan itu wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Secara konseptual, CSR di Indonesia masih harus dibedakan antara CSR berskala besar dan CSR yang dilaksanakan oleh usaha kecil dan menengah dari segi dasar hukum pelaksanaannya. Usaha kecil dan menengah dapat dengan mudah memberikan pengaruh yang merugikan bagi masyarakat dan lingkungan seperti halnya perusahaan besar, namun hingga saat ini, anggapan bahwa CSR hanya diperuntukkan bagi perusahaan besar masih tetap ada. Selain itu, tidak seperti efek dari satu perusahaan besar, efek kumulatif dari sejumlah besar usaha kecil dan menengah akan jauh lebih sulit untuk ditangkal. Melihat tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Indonesia melalui lensa persyaratan pelaporan, menjadi jelas bahwa perusahaan yang memiliki program CSR tidak selalu memiliki akuntansi lingkungan (Ayu, 2022). Hal ini disebabkan karena konservasi lingkungan belum menjadi komponen inti dari kegiatan perusahaan.

D. Alasan Penerapan Green Accounting di Indonesia

Upaya untuk mengadopsi akuntansi hijau pasti ada harganya. Ini adalah biaya yang harus ditanggung oleh bisnis untuk menyediakan produk dan layanan kepada pelanggan. Dengan adanya tugas yang diberikan, diharapkan akan terbentuk lingkungan yang sehat dan terpelihara. Salah satu indikator kunci keberhasilan perusahaan adalah kinerja lingkungannya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa akuntansi lingkungan harus dipraktikkan:

1. Perusahaan dapat berinvestasi dalam proses teknologi hijau, memikirkan kembali barang-barang mereka, dan membuat penyesuaian pada operasi dan pemeliharaan mereka untuk memotong atau menghilangkan biaya lingkungan secara drastis.
2. Jika tidak, biaya lingkungan akan sulit terlihat, jika tidak diserap ke dalam biaya overhead atau sama sekali diabaikan.
3. Banyak bisnis telah menemukan bahwa mereka dapat menghasilkan uang dari sampah sebagai produk, yang membantu menutupi pengeluaran lingkungan mereka.

4. Kesehatan manusia dan kesuksesan bisnis dapat sangat ditingkatkan dengan pengelolaan biaya lingkungan yang lebih baik, yang pada gilirannya mengarah pada kinerja lingkungan yang lebih baik.
5. Pemahaman yang lebih baik tentang biaya lingkungan, serta proses dan kinerja produk, dapat meningkatkan harga produk dan estimasi biaya, dan juga dapat membantu bisnis dalam mengembangkan produk dan layanan di masa depan yang tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan.
6. Produk, layanan, dan prosedur ramah lingkungan memberikan keunggulan bagi perusahaan di pasar. Ketika sebuah bisnis berhasil memproduksi barang dan memberikan layanan berdasarkan prinsip-prinsip ramah lingkungan, masyarakat akan memandang merek tersebut dengan baik. Oleh karena itu, sisi pendapatan produk akan terpengaruh, dan perusahaan dapat mengalami kekhasan pasar. Masyarakat bersedia membayar lebih mahal untuk produk yang sadar lingkungan.
7. Pengoperasian seluruh sistem manajemen lingkungan dan pengembangan organisasi dapat didukung oleh akuntansi untuk biaya lingkungan dan kinerja lingkungan. Penerapan standar global ISO 14001 akan membuat sistem seperti itu wajib bagi bisnis yang terlibat dalam perdagangan internasional dalam waktu dekat.
8. Nilai pemegang saham akan meningkat sebagai hasil dari transparansi perusahaan terhadap biaya lingkungan, yang mencerminkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan. Pengungkapan memungkinkan pemegang saham untuk mengakses informasi dengan lebih cepat dan mudah, yang membantu dalam pengambilan keputusan .

E. Kendala Yang Dihadapi

Pelaporan CSR juga dipengaruhi oleh struktur tata kelola. Sulit bagi para pemangku kepentingan untuk menuntut akuntabilitas perusahaan melalui proses tata kelola, karena sistem tata kelola yang ada saat ini masih berfokus pada kepentingan pemegang saham. Hal ini masuk akal karena pemegang saham adalah pihak yang pertama kali menanamkan uangnya ke dalam suatu bisnis, dan mereka juga pihak yang, setelah semua klaim pihak lain dipenuhi, memiliki keputusan terakhir tentang siapa yang akan mendapatkan bagian dari keuntungan. Perangkat baru diperlukan untuk pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan penciptaan aktivitas, termasuk komite CSR, harus dimasukkan ke dalam kerangka kerja tata kelola. Saat ini belum ada aturan di Indonesia yang mewajibkan perusahaan untuk membentuk komite CSR, dan bahkan lebih sedikit lagi perusahaan yang memiliki komite CSR. Khususnya untuk bisnis yang beroperasi di industri yang dapat menimbulkan eksternalitas negatif, seperti pertambangan dan kehutanan, komite CSR harus dibentuk. Sebagai alat tambahan untuk implementasi CSR, jasa assurance atas laporan CSR tersedia dari pihak ketiga, organisasi yang tidak memihak, yang bertugas meyakinkan para pemangku kepentingan bahwa laporan tersebut telah mengikuti semua persyaratan pelaporan yang berlaku. Fakta bahwa temuan-temuan yang telah diverifikasi secara independen masih harus diuji konsistensi, ketangguhan, dan keandalannya merupakan isu lain yang muncul. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jasa assurance biasanya menggunakan standar asuransi keuangan, yang tidak cocok untuk laporan CSR karena cakupannya yang lebih luas dan lebih bersifat kualitatif, dan tidak ada standar asuransi yang diterima secara luas yang berkaitan dengan pelaporan CSR, oleh karena itu, auditor eksternal memerlukan standar asuransi yang diakui secara umum untuk memvalidasi laporan CSR, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afni et al. (2019) menyusun daftar perusahaan ekstraktif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terlibat dalam program lingkungan, yaitu

perusahaan-perusahaan yang metode produksinya bergantung pada sumber daya alam. Penelitian yang dilakukan oleh Agustin (2010) mendukung hipotesis-hipotesis sebelumnya. Menurut temuannya, kinerja lingkungan tidak banyak berpengaruh terhadap kesuksesan finansial bisnis. Hanya dengan memiliki standar kualitas (seperti ISO 9001 dan ISO 14001) dan terlibat dalam inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tidak menjamin bahwa sebuah perusahaan akan mencapai hasil keuangan yang lebih baik dari yang diharapkan. Agustin & Triani (2010) tidak menemukan adanya hubungan antara kinerja ekonomi dengan alokasi dana CSR, dan juga tidak ada hubungan antara alokasi dana CSR dengan kinerja lingkungan. Karena tidak ada pedoman yang diterima secara universal untuk pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), perusahaan mungkin berfokus pada persepsi publik daripada metrik yang benar-benar penting bagi laba mereka. Temuan tersebut mengungkapkan berbagai macam jenis laporan yang tidak berkaitan dengan masalah keuangan. Alasannya, standar Global Reporting Initiative (GRI) masih bersifat opsional, dan tidak ada norma yang seragam, sehingga tampaknya perusahaan-perusahaan publik di Indonesia hanya mementingkan pemenuhan kewajiban hukum dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Akibatnya, inisiatif CSR sebagian besar dikategorikan sebagai kewajiban sosial, dengan beberapa perusahaan menerapkan CSR semata-mata untuk memenuhi mandat pemerintah. Hanya sekitar 10% perusahaan publik Indonesia yang melaporkan informasi lingkungan dan sosial dalam laporan tahunan mereka tahun 2004. Laporan lingkungan dan sosial hanya disusun oleh sejumlah kecil perusahaan, hal ini sesuai dengan Rindiyawati & Arifin (2019).

Tindakan-tindakan yang diambil untuk meningkatkan pelaksanaannya. Upaya-upaya untuk meningkatkan pelaporan dalam akuntansi lingkungan meliputi hal-hal berikut ini:

1. Membuat pedoman untuk akuntansi lingkungan. Pedoman Pelaporan Keberlanjutan diharapkan dapat dikembangkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan tujuan untuk mencapai keseragaman dan memenuhi fungsi keterbandingan.
2. Penting untuk mengikuti protokol pelaporan yang ada saat ini. Perlunya pelaporan keberlanjutan yang diwajibkan berasal dari fakta bahwa, dalam jangka panjang, setiap tindakan bisnis akan memiliki dampak terhadap manusia dan planet ini.
3. Ketiga, memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah menerapkan pelaporan keberlanjutan. Ikatan Akuntan Indonesia Divisi Akuntan Manajemen berharap bahwa dengan menyelenggarakan Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA), mereka dapat meningkatkan profil bisnis dan tanggung jawab karyawan mereka untuk mengungkapkan bagaimana operasi mereka mempengaruhi lingkungan.

Melakukan audit terhadap lingkungan. Agar laporan keberlanjutan lebih kredibel, laporan tersebut harus dilengkapi dengan audit lingkungan. Menetapkan prosedur Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) untuk menjamin pemenuhan kewajiban terhadap lingkungan. Akuntansi hijau dan pelaporan keberlanjutan yang lebih dapat dipercaya dan lebih baik diantisipasi sebagai hasil dari pembentukan komite CSR di dalam komponen tata kelola.

SIMPULAN

Temuan studi ini menunjukkan bahwa perusahaan besar dan menengah memberikan perhatian yang berbeda terhadap isu-isu lingkungan setempat, tetapi tingkat tanggung jawab mereka berbeda, pelaporan akuntansi lingkungan mereka berbeda, dan audit lingkungan mereka juga berbeda. Karena penelitian ini hanya menggunakan sapuan yang luas, temuan-temuannya seharusnya dapat menginspirasi proposal untuk investigasi yang lebih mendalam. Polusi tanah, air, dan udara, serta bentuk-bentuk lain dari limbah lahan, dapat menjadi subjek penelitian di

masa depan. Sebagai bagian dari kewajibannya terhadap para pemangku kepentingan, perusahaan harus mengungkapkan dampak dari kegiatan operasionalnya. Berbagai hambatan pelaporan berkontribusi pada kurangnya pemahaman umum tentang pelaporan dampak lingkungan. Untuk membuat akuntansi lingkungan menjadi lebih berguna, lebih banyak pekerjaan harus dilakukan untuk meningkatkan signifikansinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, Z., Meuthia, R., Zahara, & Rahmayani, R. (2019). Penerapan Model Telaah Kualitatif, Pelaporan dan Pemeriksaan Green Accounting Pada Perusahaan. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(2), 340–349.
- Agustin, & Triani. (2010). *Analisis Hubungan Antara Kinerja Ekonomi dan Kinerja Lingkungan Dengan Alokasi Dana CSR pada Perusahaan Ekstraktif*.
- Ayu, K. (2022). *Pengaruh Penerapan Green Accounting terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi)*.
- Azizah, W. (2022). Pandemi COVID-19: Apakah Mempengaruhi Green Accounting di Indonesia. *Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, 2(2), 153–165.
- Lako, A. (2018). Urgensi Standar Akuntansi Hijau. . . *Akuntan Indonesia, Edisi Januari-Maret*, 68–72.
- Nurafika, P., & Nurmala Sari, E. (2019). Analisis Penerapan Green Accounting di PTPN III Kebun Rambutan Dan Kebun Gunung Para. *JAKK (Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer)*, 2(1), 69–80.
- Rahmawati, M., & Subardjo, A. (2017). Pengaruh Pengungkapan Lingkungan dan Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Ekonomi yang Dimoderasi Good Corporate Governance. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 22(2), 200–222.
- Rindiyawati, A., & Arifin, J. (2019). Penentu Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Industri Perbankan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 1–12.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.abadi.
- Suyudi, M., Permana, D., & Suganda, D. (2020). Penerapan Akuntansi Lingkungan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Lingkungan. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 188–216.
- Undang-Undang No. 23 tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup.*
- Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Perseroan Terbatas.*
- Wangi, W. R., & Lestari, R. (2020 C.E.). Pengaruh Penerapan Green Accounting Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan. *Prosiding Akuntansi*, 5(1), 489–493.